

PERLINDUNGAN ANAK

unicef 

untuk setiap anak



© UNICEF Indonesia/2018/Dindaweska

Anak-anak di sebuah kamp pengungsian pascabencana gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah.

Perlindungan anak di Indonesia – Mengembangkan kebijakan dan peraturan yang kuat untuk setiap anak

Tentang perlindungan anak

Selama beberapa tahun terakhir, fokus pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan Pemerintah Indonesia telah memberikan peningkatan dampak positif pada kesejahteraan anak-anak Indonesia. Elemen kunci dalam penguatan perlindungan anak adalah perkembangan dan peningkatan kebijakan, yang harus terus diperhatikan supaya tujuan-tujuan perlindungan anak dapat tercapai. Memastikan registrasi kelahiran untuk setiap anak terus menjadi tantangan, begitu juga dengan pengurangan kekerasan terhadap anak-anak. Dukungan kesejahteraan pada anak-anak yang sudah hidup di luar pengasuhan tetap menjadi upaya yang terus berkembang, dan perlindungan anak saat bencana menambahkan dimensi lain lagi pada pengurangan risiko, persiapan dan pelaksanaan respon.

UNICEF di Indonesia

UNICEF bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung upaya-upaya perlindungan anak di seluruh Indonesia, menuju pada perkembangan sistem komprehensif yang dapat mempromosikan dan memastikan perlindungan anak, baik laki-laki maupun perempuan dalam semua konteks. Upaya ini terdiri dari penguatan bukti yang dapat memantau peraturan dan kebijakan terkait anak-anak, perkembangan kapasitas untuk pihak-pihak kunci terkait kesejahteraan anak-anak, dan memberikan dukungan teknis yang inovatif dalam reformasi kebijakan dan berbagai program terkait anak-anak ke seluruh wilayah di Indonesia. Strategi-strategi seperti ini terus diperkuat melalui pembangunan kemitraan untuk hak-hak anak, dan menjadi suara di garis depan untuk seluruh anak, dimanapun.



Pendekatan UNICEF Indonesia

Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child* – UNCRC) menunjukkan hak-hak anak sebagai prinsip etika dan standar internasional atas perbuatan terhadap anak-anak. Konvensi tersebut menentukan bahwa anak-anak – golongan orang di bawah usia 18 tahun – harus dibina untuk dapat tumbuh, belajar, bermain dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindung dari bahaya. Dalam konteks ini negara berkewajiban untuk menghormati dan mempromosikan semua hak-hak anak, dan juga melindungi semua anak-anak dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi. Negara harus mengambil langkah legislatif dan administratif yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua anak dilindungi, dan bahwa seluruh kepentingan anak merupakan pertimbangan utama dalam semua keputusan atau tindakan yang diambil.

Perlindungan Anak di dalam SDGs

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) memiliki prinsip bahwa tidak ada yang boleh ditinggalkan. Anak-anak merupakan salah satu dari kelompok terentan di seluruh dunia, maka perkembangan mereka adalah bagian integral dalam upaya-upaya untuk mencapai SDGs.

Ada 35 indikator SDG yang berkaitan langsung dengan hak-hak anak, termasuk:

- ▲ **Sasaran 4.1:** Memastikan semua anak laki-laki dan perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasar dan tinggi secara gratis, setara dan bermutu, yang menuju kepada hasil-hasil pembelajaran yang relevan dan efektif
- ▲ **Sasaran 4.A:** Membangun dan memperbaiki fasilitas pendidikan yang sensitif terhadap anak, penyandang disabilitas dan gender, dan memberikan lingkungan belajar yang aman, anti-kekerasan, inklusif dan efektif untuk semua
- ▲ **Sasaran 5.2:** Menghapuskan semua bentuk kekerasan terhadap semua perempuan dan anak perempuan di ruang umum dan pribadi, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya
- ▲ **Sasaran 5.3:** Menghapuskan semua praktek membahayakan, seperti perkawinan anak dan pernikahan paksa
- ▲ **Sasaran 16.2:** Mengakhiri pelecehan, eksploitasi, perdagangan manusia dan semua bentuk kekerasan dan penganiayaan terhadap anak-anak
- ▲ **Target 16.3:** Mempromosikan aturan hukum di tingkat nasional maupun internasional, dan memastikan akses yang setara terhadap keadilan untuk semua
- ▲ **Sasaran 16.9:** Memberikan identitas legal, termasuk akta kelahiran, untuk semua.

**PILAR
PERLINDUNGAN
ANAK**

SDG's
UNRC

Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional



Perilaku hidup sehat merupakan bagian integral dari perkembangan anak.

Mengapa hak anak penting?

Dampak perubahan sosial yang disproporsional dan -sering kali- negatif

Transformasi struktur keluarga, globalisasi, perubahan iklim, digitalisasi, migrasi massal, dan isu-isu kesejahteraan sosial dapat memberikan dampak besar pada anak-anak – bahkan lebih dalam situasi konflik bersenjata dan jenis bencana lain.

Anak-anak adalah individu

Bukan barang milik orang tua maupun negara, mereka memiliki status sebagai anggota keluarga manusia.

Anak-anak memulai hidup sebagai makhluk yang bergantung seluruhnya

Mereka bergantung pada orang dewasa terkait asuhan dan arahan yang akan membina perkembangan mereka menuju kemandirian. Jika pengasuh utama tidak mampu memenuhi peran mereka, maka negara diwajibkan untuk mengembangkan dan memperkuat pengasuhan alternatif untuk kepentingan anak itu sendiri.

Tindakan pemerintah paling berdampak pada anak-anak dibandingkan kelompok lainnya

Setiap bagian kebijakan pemerintah dapat memengaruhi anak-anak, maka semua proses pembuatan kebijakan harus mempertimbangkan kepentingan anak-anak sehingga memberi dampak positif bagi anak-anak.

Jika kita gagal melindungi anak-anak – kerugiannya dapat menjadi sangat besar

Pengalaman di kehidupan awal anak-anak sangat memengaruhi perkembangan mereka di masa depan, yang kemudian akan menentukan kontribusi, atau kerugian, yang mereka berikan kepada masyarakat seumur hidupnya.

Mendengarkan pandangan anak-anak dalam proses politik

Meskipun belum mencapai usia untuk memilih atau ikut serta dalam proses politik, pendapat dan pandangan anak-anak harus diperhatikan dan didengarkan, karena keputusan hari ini dapat memengaruhi mereka sekarang maupun di masa depan.

Perkembangan kesehatan sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat

Efek-efek penyakit, kekurangan gizi dan kemiskinan mengancam masa depan anak-anak, dan juga masa depan lingkungan yang akan mereka tinggali.



Siswa dan siswi SMK Muhammadiyah mengikuti Program Pelatihan Keterampilan Hidup di Sorong, Papua.



© UNICEF Indonesia/2018

Seorang gadis kecil berkreasi dengan tugas sekolahnya.

Registrasi kelahiran

Tantangan terkait penerimaan akta kelahiran terus mempersulit anak-anak Indonesia untuk mengakses pelayanan dasar seperti layanan kesehatan dan pendidikan, dengan 60% kelahiran anak-anak tidak dicatat pada saat lahir. Kekurangan registrasi tersebut juga dapat menghambat pembuatan kebijakan dan perencanaan untuk layanan kesehatan dan pendidikan di seluruh Indonesia.

Meskipun telah terdapat kenaikan angka registrasi kelahiran, masih ada beberapa unsur yang menyebabkan anak-anak luput dari proses administrasi akta kelahiran. Jarak yang jauh dari layanan registrasi sipil menjadi tantangan yang selalu dijumpai di pulau-pulau terpencil, sedangkan biaya tidak langsung dalam pelayanan yang gratis ini tetap mempersulit keluarga yang kurang mampu. Ketidadaan buku nikah pada beberapa orang tua bisa menyebabkan kesulitan pada registrasi anak-anak mereka, sementara kesadaran di beberapa kelompok masyarakat terkait pentingnya akta kelahiran masih rendah.



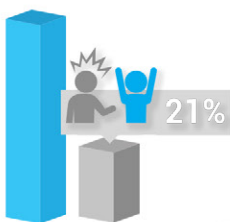
60% bayi yang baru lahir belum memiliki akta kelahiran.

Sumber: SUSENAS, 2014.

Kekerasan dan eksploitasi

Kekerasan dan eksploitasi terhadap anak-anak terus menyebabkan dampak yang signifikan pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, dan berpotensi memberikan dampak negatif dalam jangka panjang pada kesehatan fisik dan mental anak-anak. Bentuk kekerasan dan eksploitasi cukup bervariasi, namun isu-isu

seperti pernikahan dini terus terjadi karena permasalahan sosial dan ekonomi. Pelecehan fisik, mental dan seksual terus terjadi; sementara perundungan (*bullying*) maupun penindasan secara verbal banyak dialami remaja di seluruh Indonesia. Pengalaman tersebut sering diperkuat melalui interaksi *online* yang terus meluas, sementara eksploitasi digital terhadap anak juga terus meningkat di seluruh dunia. Selain berdampak negatif pada kesejahteraan anak-anak secara langsung, kekerasan dan eksploitasi juga dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan nasional secara keseluruhan.



21% murid melaporkan bahwa mereka mengalami tindakan intimidasi di sekolah.

Sumber: UNICEF Pilot Project Evaluation, 2018.

Hidup di luar pengasuhan orang tua

Isu-isu perlindungan anak meningkat pesat pada anak-anak yang sudah hidup di luar pengasuhan keluarga – baik mereka yang tinggal dengan keluarga besar, berada di lembaga pengasuhan, maupun ada dalam situasi yang kurang layak. Meskipun Indonesia sudah memiliki sistem kesejahteraan yang terus berkembang, namun sistem tersebut masih belum memberikan dukungan signifikan untuk membantu keluarga besar dalam memberikan pengasuhan anak dari kerabat dekat. Anak-anak yang terpisah dari pengasuhan orang tua sering kali ditempatkan di lembaga pengasuhan, dan situasi yang sudah kurang layak ini dapat diperburuk lagi jika lembaga pengasuhan tersebut tidak memiliki akreditasi atau pemahaman dan keterampilan terkait kesejahteraan bagi anak-anak. Pekerja sosial khusus anak-anak yang sudah tinggal di luar pengasuhan juga memiliki keterampilan terbatas dan mengalami kelebihan porsi pekerjaan, sementara pendanaan publik untuk pelayanan kesejahteraan anak masih dibawah jumlah yang diperlukan.



Sekitar 50% anak-anak dalam lembaga pengasuhan mengalami kekerasan fisik di dalam lembaga tersebut.

Sumber: Someone that Matters, Save the Children, 2007.

Perlindungan anak dalam keadaan darurat

Risiko tinggi di Indonesia terhadap bencana alam dapat memperbesar tantangan terhadap perlindungan anak, karena risiko yang dihadapi anak-anak sendiri juga meningkat dalam keadaan darurat. Banyak anak-anak



1 dari 3 pengasuh mengidentifikasi bahwa anak-anak mereka mengalami permasalahan emosional maupun berperilaku setelah gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah pada 2018.

Sumber: Crisis Centre at Psychology Faculty, University of Indonesia & UNICEF, 2019.

terlantar dan terpisah dari keluarga saat bencana, sehingga peningkatan mekanisme pelaporan dan pelacakan sangat diperlukan selama masa pergolakan. Keadaan darurat juga meningkatkan risiko pelecehan, eksploitasi dan kekerasan pada anak-anak, sehingga perlindungan anak yang kuat dalam masyarakat dan di tempat pengungsian sangat diperlukan. Stres dan isu-isu psikososial lebih sering terjadi, sehingga dukungan psikososial yang sesuai dengan pengalaman anak-anak wajib diberikan. Isu-isu registrasi kelahiran juga dapat meningkat dalam keadaan darurat, dan penerbitan kembali akta kelahiran dan dokumen-dokumen hukum lain harus diprioritaskan.

Keadilan untuk anak-anak

Sistem keadilan formal secara inheren dirancang khusus untuk orang dewasa, tetapi pada prakteknya justru sering menyebabkan konflik pada anak-anak yang harus berhadapan dengan sistem hukum. Anak-anak terpapar oleh pelecehan fisik dan emosional dalam penahanan – yang menjadi pelanggaran hak-hak mereka sebagai anak. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum dapat lebih dilindungi jika diarahkan ke luar dari sistem keadilan resmi dan didukung dengan program-program dukungan keadilan lain. Indonesia masih menghadapi tantangan untuk meningkatkan solusi-solusi bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang dan upaya yang digagas oleh pemerintah pusat sampai saat ini belum diadopsi oleh pemerintah di tingkat sub-nasional – sehingga menghambat pelaksanaan undang-undang di lapangan. Sistem saat ini juga kurang memiliki prosedur operasi standar yang komprehensif, sementara model pengalihan penyelesaian perkara anak sering dilaksanakan secara “ad hoc” dan dengan dana yang kurang.



1 dari 3 anak yang berhadapan dengan hukum mengalami penahanan melalui sistem keadilan formal.

Sumber: UNICEF Justice for Children Reform in Indonesia, 2016.

Perkawinan anak

Meskipun Undang-Undang tentang perkawinan telah direvisi untuk melindungi anak perempuan di bawah usia 19 dari pernikahan paksa, masih ada celah-celah yang memungkinkan perkawinan anak tetap terjadi di Indonesia. Banyak praktik pernikahan yang terjadi karena kepercayaan dan tradisi lama dalam budaya dan agama tertentu, dan juga terkait situasi ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu. UNICEF terus bekerja

menuju penghapusan perkawinan anak di Indonesia melalui dukungan bagi pelaksanaan upaya seperti program Pendidikan Keterampilan Hidup, yang bertujuan untuk memberdayakan kaum muda untuk menghadapi tantangan sehari-hari – termasuk perkawinan anak. Melalui pendekatan ini para peserta dapat memperoleh pengetahuan terkait topik-topik penting, dan juga diberikan keterampilan untuk mengelola risiko serta membuat keputusan yang mandiri dan berdasarkan informasi yang cukup dalam kehidupan pribadi mereka sendiri.



Sumber: Child Marriage Fact Sheet, UNICEF Indonesia, 2020.

Perlindungan online

Di tengah pesatnya perkembangan dunia digital, penting untuk menjaga keseimbangan perlindungan anak-anak dari berbagai ancaman online dengan memastikan bahwa mereka tetap dapat mengakses dan memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh dunia maya. Pelecehan seksual dan eksploitasi terhadap anak-anak di platform online terus meningkat secara global, sementara cyber-bullying atau perundungan dunia maya juga merupakan salah satu ancaman besar bagi kesehatan dan kebahagiaan anak. Meskipun ancaman online akan selalu ada, tidak berarti selalu memberikan dampak buruk bagi anak-anak. Untuk itu, upaya perlindungan harus dilakukan ketika anak-anak memanfaatkan kesempatan untuk belajar dan menggunakan hak mereka untuk berekspresi di dunia maya. Semua unsur tersebut harus dipertimbangkan saat menciptakan ruang digital yang aman bagi anak-anak Indonesia.



1 dari 3 anak merupakan korban cyberbullying.

Sumber: Child Protection Online Advocacy Brief, UNICEF, 2019.



Seorang anak sedang bermain gim di ponsel pintarnya.

Akta Kelahiran untuk Semua

Program Percontohan Akta Kelahiran telah dilaksanakan UNICEF Indonesia untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam memperkuat sistem registrasi kelahiran di beberapa daerah di Indonesia. Bersama-sama dengan pemerintah nasional maupun lokal, program ini mengidentifikasi solusi-solusi yang berkelanjutan untuk mengatasi hambatan dan gangguan pada proses registrasi. Program ini juga berfokus pada pengambilan dan analisa data kelahiran, serta pemanfaatan data tersebut dan juga database untuk pembuatan kebijakan dan advokasi pada beberapa tingkat pemerintah. Secara keseluruhan, program percontohan (pilot) ini telah menunjukkan peningkatan angka pencatatan kelahiran yang cukup signifikan (rata-rata 17,5% di seluruh lokasi pilot), sehingga bisa menjadi bukti yang kuat untuk melakukan upaya serupa di daerah lain. Upaya pengembangan program ini perlu mempertimbangkan konteks lokal masing-masing, dan juga harus memastikan akses yang setara pada semua penerima manfaat.

© UNICEF Indonesia/2019/Rizka Fatimah Ramli



Ilustrasi yang menggambarkan perkawinan anak, oleh Rizka, pemenang kontes internasional komik pahlawan super untuk murid sekolah yang diselenggarakan UNICEF.

PKSAI: Program Kesejahteraan Sosial Terpadu

Sistem kesejahteraan sosial di Indonesia sudah memiliki unsur-unsur dasar yang dapat menciptakan program perlindungan anak yang kuat, mendukung Kementerian Sosial Indonesia dan UNICEF dalam perkembangan dan pelaksanaan *Program Kesejahteraan Sosial Anak Integratif* (PKSAI). Program ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan bagi anak-anak dan keluarga-keluarga rentan, khususnya anak korban kekerasan, pelecehan, eksploitasi dan keterlantaran, dengan menjawab tantangan yang kompleks terkait pelaksanaan kebijakan, penyediaan layanan dan desentralisasi. Satu kelebihan kunci dari model PKSAI – yang telah dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia – adalah peningkatan akses kepada layanan kesehatan, penegakan hukum, pendidikan dan registrasi kelahiran bagi anak-anak dan keluarga-keluarga. Pendekatan terpadu ini dapat menjawab isu-isu perlindungan anak di Indonesia yang telah teridentifikasi – yaitu minimnya koordinasi antarpemedia layanan di dalam sistem perlindungan anak Indonesia.

Standar Minimum Perlindungan Anak dalam Upaya Kemanusiaan

Anak-anak Indonesia sangat rentan terhadap risiko bencana alam, mendesak para pihak yang bergerak di sektor kemanusiaan untuk memprioritaskan perlindungan anak dari kekerasan, pelecehan, eksploitasi dan penelantaran dalam konteks keadaan darurat. *Standar Minimum Perlindungan Anak dalam Aksi Kemanusiaan* – dibuat oleh *The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action* – merupakan pedoman global yang disarankan untuk digunakan oleh semua pihak di sektor ini untuk bekerja sama secara cepat dan inklusif agar dapat menjaga hak-hak anak sebelum, selama dan setelah bencana terjadi. Pedoman perlindungan anak tersebut telah dimanfaatkan oleh pemerintah dari berbagai negara, organisasi sipil dan pihak swasta yang ikut terlibat dalam upaya pengelolaan bencana. Standar ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas perlindungan anak, membangun prinsip-prinsip dasar dan memperkuat koordinasi antarpihak sektor kemanusiaan, dan juga terus mengadvokasi dan menyebarkan praktik-praktik baik dari perlindungan anak di dalam keadaan bencana.

PERMINTAAN KUNCI



© UNICEF Indonesia/2018/Noorani

Potret keceriaan anak-anak saat bermain di halaman belakang.

UNICEF terus memberikan anjuran bagi negara Indonesia bahwasanya semua anak harus memiliki akta kelahiran, bebas dari kekerasan dan eksploitasi, didukung oleh sistem kesejahteraan sosial yang kuat dengan intervensi keadilan khusus bagi anak, dan diberikan perhatian spesifik dalam persiapan bencana dan upaya pengurangan risiko.

Untuk mencapainya, UNICEF meminta aksi dari pembuat kebijakan untuk membuat perundang-undangan, mengawasi dan mendanai penguatan upaya-upaya perlindungan anak di seluruh Indonesia.



Membuat perundang-undangan

- ☑ Memastikan registrasi dan akta kelahiran untuk semua anak yang lahir di Indonesia – tanpa memandang latar belakang, agama atau status pada saat lahir
- ☑ Membuat perundang-undangan yang patuh pada UNCRC, dan menghapus perundang-undangan yang memperbolehkan diskriminasi terhadap anak-anak – seperti diskriminasi berdasarkan status pernikahan orang tua
- ☑ Melaksanakan standar-standar nasional pengasuhan di lembaga-lembaga pengasuhan dan menerapkan dan mengembangkan perlindungan sosial yang mendukung reintegrasi anak-anak di dalam lingkungan pengasuhan yang berbasis keluarga
- ☑ Melindungi anak-anak dari ancaman online dan digital seperti eksploitasi seksual, konten yang mengandung kekerasan, dan berbagai jenis pengasingan sosial dan *bullying*, tanpa membatasi kesempatan mereka untuk belajar dan mendapatkan manfaat dari teknologi.



Mengawasi

- Upaya-upaya untuk memastikan disparitas registrasi kelahiran berdasarkan lokasi dapat teratasi
- Pelaksanaan perundang-undangan yang berfokus pada unsur-unsur kerentanan anak dan keluarga yang berujung dengan institusionalisasi dan pemisahan keluarga
- Penegakan peraturan yang ada, yang dapat melindungi anak-anak dari semua bentuk kekerasan
- Pelaksanaan peraturan keadilan remaja, dengan fokus yang khusus terhadap peningkatan mekanisme pengalihan penyelesaian perkara anak.



Mendanai

- Mengalokasikan anggaran di dalam sektor kesehatan khusus untuk perlindungan anak terpadu yang kuat dan berbasis masyarakat
- Menyiapkan anggaran untuk perkembangan dan penguatan model PKSAI yang dapat memberikan layanan yang komprehensif, mudah diakses dan bermutu di tingkat provinsi maupun daerah
- Berinvestasi dalam penguatan tenaga kerja layanan sosial untuk meningkatkan penyediaan layanan yang profesional dan menambahkan pekerja sosial di lapangan
- Seluruh upaya-upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dapat diprioritaskan dalam penganggaran
- Memberikan alokasi dana yang kuat kepada upaya perlindungan anak di dalam program-program persiapan bencana dan pengurangan risiko.



Staf UNICEF mendukung pusat-pusat pendidikan pascabencana gempa bumi dan tsunami Sulawesi Tengah.



© UNICEF Indonesia/2015/Joshua Estey

Seorang ibu berjalan sembari menggendong putrinya yang berusia 3 tahun di jalan Desa Kemalang, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

Presiden Joko Widodo telah memberikan tiga instruksi untuk mengatasi kekerasan terhadap anak-anak di Indonesia, yaitu:

1. Aksi pencegahan dilakukan dengan berbagai model kampanye, model-model sosialisasi dan edukasi publik, yang bukan hanya menarik tapi memunculkan kepedulian sosial pada persoalan kekerasan pada anak
2. Menyiapkan sistem pelaporan dan pengaduan khusus untuk anak-anak, yang mudah dan mengutamakan respons yang cepat terhadap laporan yang masuk
3. Melakukan reformasi besar-besaran pada manajemen penanganan kasus kekerasan pada anak sehingga bisa dilakukan dengan cepat, terintegrasi dan lebih komprehensif, yang juga berpotensi dilaksanakan melalui one stop service mulai dari layanan pengaduan pendampingan hingga mendapatkan layanan kesehatan.

“

Saya yakin fenomena kekerasan terhadap anak merupakan fenomena gunung es yang selama ini tidak pernah dilaporkan dan hanya sebagian kecil kasus yang dilaporkan.

– Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia

”

UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT, SILAKAN HUBUNGI:

UNICEF Indonesia

Telepon: + 62 21 5091 6100

Alamat: World Trade Center 2, 22nd Floor

Jl. Jend Sudirman Kav 31, Jakarta, Indonesia

www.unicef.org

